

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Noor, Bagas Heradhyaksa, 2021, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia*, Semarang: Mutiara Aksara.
- Amirudin, Zainal Asikin. 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Arfan, Abbas, 2017, *99 Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah dan Tipologi Penerapannya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. UIN-Maliki Press.
- Arsyad Subhan Purba dkk, 2023, “Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 3.
- Astawa, I Gde Pantja, 1990, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Azkia, Muhammad Dhiya, 2020, “Kesesuaian Akad Rahn Dalam Layanan Gadai Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI/NO:25/DSN-MUI/III/2002 Serta Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pihak Perum Pegadaian Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok”. *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, 2015, “Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-undang

- No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol 1, No. 1.
- Hariati, Sri, 2024, “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 5, No. 1.
- Her, “Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguntit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-hol17923/>, diakses 3 Januari 2025
- Indrati, Maria Farida , 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Iriansyah, Iriansyah, 2017, “Tinjauan Hukum Atas Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah”, *Journal of Law*, vol 5, No. 1.
- Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Rasul Muttakin, Bandung: Nusa Media.
- Khotimah, Ihda A’yuni, 2024, “Fatwa-fatwa DSN MUI Terkait Gadai (Rahn), Rahn Haqiqi dan Rahn Tasjily”, *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 4.
- Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia.
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Muhammad, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Depok: Rajawali Pers.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Cet. 3*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Mulazid, Ade Sofyan , 2016, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Naida Nur, Dodik, 2012, “Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 2.
- Nazir, Muhammad, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ongky Alexander dkk, 2023, “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 1.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Roadmap Keuangan Bisnis Syariah 2017-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2023, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses 5 Januari 2025.
- Pakpahan, Rudy Hendra, 2012, “Akibat Hukm Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No 3.
- Pasha, Aufi Ramadhania, “Menenal OJK: Sejarah, Fungsi dan Kebijakan Strategi Terkini”, <https://www.cermati.com/artikel/menal-ojk-sejarah-fungsi-dan-kebijakan-strategi-terkini>, diakses 5 Januari 2025
- Purwaka, Tommy Hendra, 2011, *Metodologi Hukum*, Jakarta, *Atma Jaya*.
- Ridho, M. Rusydiyana Nur, 2012, “kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif

- Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Samudra, Muhammad Aji, 2019, “Wanprestasi Murtahin dalam Akad Pegadaian Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No.1.
- Sandu Siyoto, Ali sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suharto, Tentiyo, 2024, “Implementasi Regulasi dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”, *JIBF MADINA*, Vol.5 No.1.
- Syamsuddi, Aziz, 2011 *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Toer, Pramoedya Ananta, 1980, *Bumi Manusia*, (Hasta Mitra : Jakarta).
- Wakhyuni, Maylinda Tri, 2021, “Analisis Implementasi Fatwa Dsn Mui Pada Produk Gadai (Rahn) Emas Di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu”. *Skripsi Prodi Perbankan Syariah*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri.
- Yuyun Juwita Lestari, Iza Hanifuddin, 2021, “Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5 No. 2.
- Zaenal Arifin Adhi Putra Satria “Disharmonisasi Peraturan Perundangundangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi” dalam <https://Repo.Jayabaya.Ac.Id/2117/3/Jurnal%20Pro%20Hukum%20Dr%20Zaenal%20Arifin.Pdf>, Diakses 4 Januari 2025.

REGULASI

Pasal 49 Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha

Pergadaian

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 53 /SEOJK.05/2017 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan

Undang-Undang tentang Peradilan Agama terakhir kali diamandemen menjadi

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama